

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perubahan politik lokal sangat luar biasa yang berdampak pada demokratisasi tingkat lokal. Perubahan politik lokal antara lain ditandai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (irtanto, 2014). Instrumen politik yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dalam upaya melakukan penguatan demokrasi lokal.

Bangsa Indonesia telah menuju kehidupan pemerintahan demokratis. Sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, berbagai aspek demokrasi coba telah diterapkan Pemerintah Indonesia. Satu hal syarat yang perlu dilakukan menjadi negara demokratis yakni terselenggaranya Pemilihan Umum, baik itu memilih presiden dan wakilnya, legislator, kepala daerah, secara langsung. Pemilihan umum secara langsung dinilai demokratis karena melibatkan partisipasi publik atau masyarakat dalam menentukan masa depan di tangan pemimpinnya (fernandes, 2016).

Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat memang disambut cukup positif, sebagai upaya dan harapan akan penguatan demokrasi lokal. Pemilihan kepala daerah langsung diharapkan dapat menggeser proses

keterwakilan politik dari yang bersifat elitis ke populis. Pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan pula bisa menghilangkan broker-broker politik dalam pemilihan kepala daerah ketika prosesnya ditentukan oleh anggota DPRD. Namun penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung yang diproyeksikan sebagai pesta demokrasi di aras lokal, ternyata masih dinilai kurang ideal dan demokratis.

Di beberapa daerah masih diwarnai oleh tindakan anarkisme massa dan perselisihan (konflik) yang tak kunjung usai. Lalu yang menjadi fenomena lainnya dalam Pilkada secara umum di Indonesia adalah banyaknya kepala daerah terpilih yang hanya meraup suara di bawah 50 persen yang dimana perlu diperhatikan bahwa dukungan rakyat atas bupati terpilih diperlukan untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan sosial baik masyarakat yang mendukung atau tidak mendukungnya. Selain itu kegagalan partai politik sebagai lembaga pendidikan politik dan tidak berperannya fungsi partai politik (irtanto, 2014). Kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi dan pendidikan politik baik menjadikan partai politik tidak mampu memberikan pilihan calon pemimpin kepada masyarakat.

Tahun 2015 merupakan babak baru dalam pemilihan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia, karena pada tahun ini untuk pertama kalinya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak di 9 provinsi, 224 Kabupaten dan 36 Kota yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016. Namun tidak semua daerah provinsi, kabupaten dan kota yang

melaksanakan pesta demokrasi itu mempunyai calon lebih dari satu, ada beberapa daerah yang hanya mempunyai satu calon atau calon tunggal sehingga perayaan pesta demokrasinya ditunda karena UU No. 8 tahun 2015 mensyaratkan bahwa Pilkada dapat berjalan apabila minimal ada dua calon.

Fenomena calon tunggal ini membuat Komisi Pemilihan Umum untuk selanjutnya disebut KPU mengambil keputusan untuk memperpanjang masa pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota. Perpanjangan tahap pertama menyisakan beberapa daerah yang tetap mempunyai calon tunggal. Perpanjangan tahap kedua yang berlangsung pada tanggal 9 sampai 11 Agustus 2015 masih menyisakan daerah yang mempunyai calon tunggal. Karena masih adanya daerah yang masih terbelenggu dengan masalah calon tunggal, diputuskanlah pelaksanaan Pilkada di daerah tersebut diundur hingga tahun 2017 (Redaksi Suara KPU, 2015).

Sesuai Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 bahwa dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar, maka Komisi Pemilihan Umum setempat menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pilkada diselenggarakan pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017. (Sesuai ketentuan Pasal 201 ayat (2) UU No 5 Tahun 2015). Agar tidak dibutuhkan penundaan bagi daerah yang mempunyai calon tunggal, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dengan terbitnya undang-undang tersebut membawa warna baru dalam proses Pilkada. Munculnya calon tunggal dalam Pilkada tetap harus berjalan karena sudah diatur dalam konstitusi. Pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar (pasal 54C ayat 2). Warga negara diberikan ruang partisipasi untuk menentukan pilihannya, yaitu antara pasangan calon tunggal atau kotak kosong.

Diperlukan uji akseptabilitas politik warga negara. Dengan melawan kotak kosong, elektabilitas dan legitimasi calon tunggal diuji. Apakah pasangan calon lebih tinggi mendapat akseptabilitas politik warga negara atau sebaliknya dan apakah benar pilihan partai politik sejalan dengan pilihan publik. Hal seperti ini merupakan hal baru dalam proses kehidupan demokrasi di Indonesia.

Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2017 muncul fenomena baru lain dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia khususnya di daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Sebagai dampak dari perubahan atas peraturan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Gerakan dari masyarakat mulai tampak ke permukaan sebagai partisipasi warga negara dalam arus sistem demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam mengawal pemilihan kepala daerah dirasa sangat penting untuk mewujudkan pemimpin politik yang legitimate dan berkualitas di tingkat lokal sangat ditentukan oleh akuntabilitas, kualitas, efisiensi, efektivitas,

dan pengaturan yang jelas serta penegakan hukum yang adil pada setiap proses penyelenggaraan pemilihannya.

Ajang pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pati akan dilakukan pada 15 februari 2017. Pasangan Haryanto dan Syaiful Arifin resmi ditetapkan sebagai calon tunggal pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pati yang akan dihelat pada 15 februari mendatang dengan diusung delapan dari sembilan partai yang memiliki kursi di DPRD. Haryanto-Arifin akan melaju melawan kotak kosong (Lismanto, 2016).

Setelah resmi ditetapkannya pasangan calon kepala daerah tersebut, warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, membuat gerakan pilih kotak kosong untuk melawan calon petahana Haryanto-Saiful Arifin sebagai satu-satunya yang maju dalam pemilihan kepala daerah 15 februari 2017. Gerakan ini sebagai perlawanan secara politik ketika delapan dari sembilan partai di daerah tersebut hanya mencalonkan satu pasang calon. Gerakan ini juga sebagai ekspresi kekecewaan terhadap sikap partai politik di Kabupaten Pati yang dianggap gagal menciptakan kader untuk mencalonkan kepala daerah (Faisol, 2017). Gerakan yang dibentuk oleh masyarakat mengindikasikan aspirasi yang tidak tersalurkan.

Relawan pendukung kotak kosong di Pilkada Kabupaten Pati yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) mengklaim memiliki jaringan relawan kotak kosong yang tersebar di 21 Kecamatan di Kabupaten Pati (Kholistiono, 2016). Gerakan ini menyerukan agar tidak melakukan golput atau tidak memilih di tempat pemungutan suara saat pemilihan bupati dan wakil bupati pada 15 februari 2017. Bahkan tidak jarang

mereka menggunakan ajakan secara teknis untuk mempengaruhi calon pemilih atau mengkampanyekan untuk memilih kotak kosong pada pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung.

Pada pelaksanaan kampanye di daerah yang hanya ada satu pasangan calon, belum ada regulasi di Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengaturnya. Namun kampanye mendukung kotak kosong juga tidak dilarang. Memilih kotak kosong juga bagian dari aspirasi politik yang bisa disalurkan saat pemungutan suara di Pilkada. Jika ada pemilih yang memilih kotak kosong maka bukan diartikan sebagai golput atau tidak menggunakan hak pilihnya. Sebab prinsipnya adalah setiap warga negara berhak memilih pasangan berwujud manusia, maupun berwujud kotak kosong.

Dengan jaringan relawan kotak kosong yang tersebar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Pati dapat menggambarkan perkembangan gerakan masyarakat yang sangat menarik untuk diketahui, bagaimana proses pergerakan yang dilakukan oleh relawan kotak kosong dalam mengawal demokrasi dalam Pilkada Kabupaten Pati pada tahun 2017.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas diketahui bahwa ada fenomena baru dinamika politik lokal dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yakni munculnya gerakan sosial oleh masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang mengkampanyekan untuk memilih kotak kosong pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pati 2017. Maka permasalahan yang penulis kemukakan adalah bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pati tahun 2017 ?

Agar lebih mudah menjelaskan gerakan dari Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati, peneliti membagi kedalam dua bagian pertanyaan, yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya gerakan AKDPP ?
2. Bagaimana karakteristik AKDPP sebagai gerakan sosial dalam Pilkada Kabupaten Pati 2017 ?
3. Bagaimana tipologi dan bentuk strategi dari AKDPP sebagai gerakan sosial dalam Pilkada Kabupaten Pati 2017 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab munculnya gerakan AKDPP dalam Pilkada Kabupaten Pati 2017.
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana karakteristik gerakan sosial yang dilakukan oleh Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati dalam upaya mencapai tujuannya .
3. Untuk mengetahui tipologi dan bentuk strategi yang digunakan AKDPP dalam mencapai tujuannya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, keilmuan, dan bahan kajian dalam studi ilmu pemerintahan terkait dengan dinamika politik lokal khususnya oleh gerakan sosial yang dilakukan masyarakat untuk menciptakan proses demokrasi secara sehat.

2. Manfaat Praksis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi Gerakan-gerakan Sosial lainnya dalam melakukan aktivitas-aktivitas kolektif yang bertujuan melakukan perubahan sosial.

E. LITERATURE REVIEW

Penelitian pertama dari Jurnal Review Politik yang ditulis oleh Sayekti Dwi Purboningsih (2015) tentang Gerakan Sosial Baru Perspektif Kritis: Relawan Politik Dalam Pilpres 2014 di Surabaya. Penelitian ini menjadi menarik karena dalam Pemilu 2014, terdapat fenomena menarik terkait kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua kandidat pasangan sama-sama menyatakan bahwa mereka didukung oleh simpul-simpul kekuatan masyarakat yang menyebut diri sebagai relawan dan memberikan sumbangan berupa tenaga, dukungan, dan ide kepada kedua pasangan tersebut tanpa mau diberi imbalan tertentu. Dukungan tersebut datang dari masyarakat biasa, bukan berasal dari partai politik. Mulai dari pekerja kreatif, aktivis, para

pendidik sampai ke rakyat biasa semua beramai-ramai memberikan dukungan. Mereka disebut sebagai relawan yang mendukung calon pasangan capres dan wapres. Oleh karena itu, relawan bisa dikatakan sebagai penggerak. Kelompok relawan bukan aktivis partai politik, tetapi terlibat dalam gerakan besar bersifat politis. Penelitian ini memfokuskan pada dua kelompok relawan yaitu kelompok Pondok Jokowi Presiden (PJP) Surabaya dan kelompok Rejo Jatim Bang Wetan Surabaya. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa relawan terbentuk karena visi dan misi yang sama menginginkan perubahan Indonesia, dengan mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden. Dalam hal ini ada dua kelompok relawan yaitu, Pondok Jokowi Presiden bergerak sebelum Jokowi dicapreskan karena melihat kepemimpinan Jokowi semasa menjabat Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta mempunyai integritas yang tinggi, jujur, dan sederhana. Gerakan ini berdiri secara independen. Tidak tergabung dengan partai politik atau kelompok kepentingan yang lain. Lebih mengedepankan sifat musyawarah atau gotong royong. Sehingga kelompok ini tidak mempunyai struktur organisasi yang prosedural hanya saja bersifat koordinatif.

Kelompok yang kedua adalah Rejo Jatim Brang Wetan. Kelompok ini terbentuk setelah Jokowi resmi dicapreskan, karena kelompok ini melihat kepemimpinan Jokowi semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta dan berdiri secara independen. Tetapi untuk anggotanya adalah orang-orang yang mempunyai latar belakang politik sebelumnya. Kegiatan politik menjadi relawan bukan kegiatan pertama kali yang diikuti oleh anggota kelompok ini. Oleh karena itu, kelompok ini mempunyai struktur organisasi yang prosedural dan cara bekerjanya pun sesuai dengan jabatan masing-masing.

Penelitian kedua dari Paper dalam Konferensi Nasional Sosiologi yang ditulis oleh Ari Ganjar Herdiansah, Wahyu Gunawan, dan Rd.A. Tachya Muhammad (2014) dengan judul Gerakan Komunitas Kota dan Politik Pemilu dalam Pemenangan Ridwan Kamil-Oded Danial pada Pemilihan Walikota Bandung 2013.

Hasil kajian ini menunjukkan para aktivis komunitas mampu menangkap terbukanya struktur peluang politik dengan merepresentasikan harapan warga melalui desain visual yang diolah sekelompok tim kreatif. Simpul-simpul komunitas yang semakin berkembang kemudian menyediakan jejaring sosial efektif dalam penggalangan dukungan. Dari beberapa temuan dapat dijelaskan bahwa ketiga pihak, baik tim relawan, tim PKS, dan Tim Partai Gerindra memiliki kesamaan visi untuk mendapatkan sosok Ridwan Kamil sebagai figur yang memiliki karakter kuat dalam membenahi masalah kota. Perbedaan bentuk kelompok antara tim relawan dan partai politik menentukan pendekatan mereka dalam melakukan upaya kemenangan. Tim relawan yang terdiri dari komunitas kreatif lebih bertindak secara fleksibel dan independen. Sedangkan PKS dan Partai Gerindra, dengan logika kepartaiannya, cenderung terstruktur dan normatif. Di sisi lain, perbedaan pendekatan berguna dalam membagi-bagi segmen pemilih untuk kepentingan kampanye. Tim relawan berfokus pada generasi muda, PKS pada simpatisan dan lingkungan sosial di sekitar jamaah, dan Partai Gerindra pada simpatisan akar rumput. Fleksibilitas tim relawan dalam bekerja dan posisi mereka yang bukan kompetitor menjadi faktor utama terjalannya hubungan yang kooperatif dengan PKS dan Partai Gerindra. PKS dan Partai Gerindra cenderung memanfaatkan trend positif elektabilitas

Ridwan Kamil demi kepentingan citra masing-masing partainya. Tindakan kedua partai tersebut adalah karakter alami dari organisasi partai politik yang memiliki logika elektoral yang pragmatis.

Koalisi yang dibentuk untuk kepentingan pemilu, termasuk dalam konteks Pemilihan Walikota Bandung, adalah kerjasama atas prinsip kemenangan bukan berlandaskan persamaan visi gerakan yang substansial. Di luar itu, masing-masing partai akan tetap terlibat dalam persaingan untuk memperebutkan suara pemilih. Gerakan komunitas tidak dapat menggantikan peran partai politik dalam kompetisi kemenangan pemilu, tetapi terbatas pada upaya menyediakan jaringan sosial untuk menggalang dukungan publik. Di sisi lain gerakan kemenangan Ridwan Kamil mendapat sokongan signifikan gerakan partai politik yang dilakukan oleh PKS dan Partai Gerindra.

Penelitian ketiga dari Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP) yang ditulis oleh Bambang Arianto (2014) dengan judul Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014. Dalam jurnal tersebut menunjukkan meskipun relawan politik sebagian besar berasal dari kelas menengah urban yang kritis terhadap politik. Namun, telah mampu membuat jejaring yang kuat, hingga akar rumput di berbagai kota dan desa, dengan sosok Jokowi sebagai faktor pengikatnya. Hal itu diperkuat oleh sosok Jokowi yang telah mampu melawan tatanan lama sekaligus menjadi representasi dari demokrasi substansif yang mau mendengarkan suara rakyat ketimbang hanya didengar. Sehingga, ada antusiasme besar dari publik bahwa langkah politik kubu oligarki dalam kontestasi presidensial 2014 dapat direspon secara kreatif oleh aksi kolektif relawan politik termasuk melakukan pengawalan suara dengan baik. Fenomena

relawan politik dalam kontestasi presidensial 2014 dapat menjadi titik awal dari dinamika transformasi nilai-nilai politik yang bernuansa patrimonial, oligarkis menuju *volunterisme* dan partisipatoris.

Penguatan relawan politik dalam bentuk partisipatoris non-formal menjadi alternatif terbaik dalam upaya menjaga marwah pemerintahan Jokowi yang populis. Jika fungsi ini dapat berjalan secara simultan maka posisi relawan dapat menjadi bagian dari gerakan kewargaan yang kritis, rasional sekaligus suplemen demokrasi guna memperluas keterlibatan warga (*civic engagement*). Perlu dirumuskan skema simbiosis-mutualisme dalam mewujudkan tujuan praktis yang sejalan dengan cita-cita ideologis antara relawan politik dan Jokowi sebagai sosok pemikat. Hal ini ditujukan untuk membentuk relawan politik sebagai suplemen demokrasi, bukan substitusi demokrasi yang dapat menjadikan wajah demokrasi semakin suram.

Penelitian keempat dari Panel "Demokrasi dari Bawah" yang ditulis oleh Hendra Budiman dengan judul Menakar Perlawanan Politik Elektoral; Pengalaman Gerakan Rakyat di Bengkulu. Dalam tulisan ini dapat ditemui bagaimana cara rakyat merespon momentum politik lokal, baik pemilihan anggota DPD maupun Pemilihan Kepala Daerah langsung dengan caranya sendiri untuk menghadapi berbagai kekuatan politik utama, elit politik dan praktek politik kelas menengah dalam konteks Bengkulu. tulisan ini menunjukkan bagaimana kelihaihan rakyat memainkan peran politisi dalam Pilkada 2015 di Bengkulu. peran ini dimainkan untuk memanfaatkan momentum Pilkada sebagai ajang "balas dendam" dan perlawanan diam-diam. Rakyat mendayagunakan hak pilihnya sebagai kekuatan tawar dengan para

politisi. Secara implisit, rakyat telah mengubah penampakkannya sebagai politisi, yang mampu melakukan tekanan dan tawar menawar dengan rival politiknya.

Di Bengkulu, warga desa tidak melakukan kontrak politik, tapi langsung meminta kebutuhan konkret saat itu juga. Tidak menunggu hasil: menang atau kalah. Beragam permintaannya: perbaiki jalan dan jembatan, beasiswa untuk anak miskin, pipa paralon untuk saluran air, kursi dan tenda untuk balai desa, seng untuk atap rumah para warga desa dan lain sebagainya yang merupakan kebutuhan mendesak semua warga saat itu. Hampir tidak ditemukan komitmen yang dituangkan dalam kontrak politik. Rakyat telah mampu melakukan perlawanan dalam bentuk yang berbeda. Bahwa negosiasi politik dilakukan karena yang dihadapannya diposisikan sebagai rival (musuh) bukan sebagai kawan. Sebagaimana misi dari gerakan, untuk terus memacu perlawanan rakyat atas paham dominan.

Tabel 1
 Penelitian terdahulu tentang *civil society* dan gerakan sosial dalam pemilihan umum

No.	Nama	Judul	Temuan Masalah
1.	Sayekti Dwi Purboningsih	Gerakan Sosial Baru Perspektif Kritis: Relawan Politik Dalam Pilpres 2014 di Surabaya.	Relawan terbentuk karena mempunyai visi dan misi yang sama menginginkan perubahan Indonesia, dengan mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden. Pondok Jokowi Presiden bergerak sebelum Jokowi dicapreskan, gerakan ini berdiri secara independen. tidak mempunyai struktur organisasi yang prosedural hanya saja bersifat koordinatif. Rejo Jatim Brang Wetan. Kelompok ini terbentuk setelah

			Jokowi resmi dicapreskan, anggotanya adalah orang-orang yang mempunyai latar belakang politik sebelumnya, mempunyai struktur organisasi yang prosedural dan cara bekerjanya pun sesuai dengan jabatan masing-masing
2.	Ari Ganjar Herdiansah, Wahyu Gunawan, dan Rd. A. Tachya Muhammad	Gerakan Komunitas Kota dan Politik Pemilu dalam Pemenangan Ridwan Kamil-Oded Danial pada Pemilihan Walikota Bandung 2013.	Gerakan komunitas tidak dapat menggantikan peran partai politik dalam kompetisi pemenangan pemilu, tetapi terbatas pada upaya menyediakan jaringan sosial untuk menggalang dukungan publik. Di sisi lain gerakan pemenangan mendapat Ridwan Kamil mendapat sokongan signifikan gerakan partai politik yang dilakukan oleh PKS dan Partai Gerindra.
3.	Bambang Arianto	Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014.	Relawan politik sebagian besar berasal dari kelas menengah urban yang kritis terhadap politik. Namun, telah mampu membuat jejaring yang kuat, hingga akar rumput di berbagai kota dan desa, dengan sosok Jokowi sebagai faktor pengikatnya. Penguatan relawan politik dalam bentuk forum partisipatoris non-formal menjadi alternatif terbaik, jika fungsi ini dapat berjalan secara simultan maka posisi relawan dapat menjadi bagian dari gerakan kewargaan yang kritis, rasional sekaligus suplemen demokrasi guna memperluas keterlibatan warga.
4.	Hendra Budiman	Menakar Perlawanan Politik Elektoral; Pengalaman Gerakan Rakyat di Bengkulu.	Rakyat telah mampu melakukan "perlawanan" dalam bentuk yang berbeda. Rakyat mendayagunakan hak pilihnya sebagai kekuatan tawar dengan para politisi. Bahwa negosiasi politik dilakukan karena yang dihadapannya diposisikan sebagai rival (musuh) bukan sebagai kawan. Sebagaimana misi dari gerakan, untuk terus memacu

			perlawanan rakyat atas paham dominan.
--	--	--	---------------------------------------

Dalam penelitian terdahulu peneliti dapat melihat dan mempelajari berbagai bentuk gerakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil ketika menghadapi pemilihan umum di tingkat nasional maupun lokal. Penelitian yang telah dilakukan hampir sama dengan yang dilakukan oleh peneliti yang sekarang tentang gerakan sosial dalam pemilihan umum akan tetapi berbeda dalam hal studi kasus yang diteliti.

Melihat dari kajian yang sudah ada sebelumnya, maka peneliti akan melakukan penelitian tentang gerakan sosial yang muncul dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pati dengan adanya perubahan aturan dalam proses pemilihan umum serentak 2017 yang menghadirkan kolom kosong sebagai kontestan Pilkada di Kabupaten Pati.

Hal menarik dalam penelitian ini yang menjadikan berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengambil tema tentang gerakan sosial dalam pemilihan umum di tingkat lokal khususnya di Kabupaten Pati yang dilakukan oleh Aiansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati sebagai kelompok masyarakat yang mendukung kolom kosong dalam Pilkada. Mengingat bahwa pada proses pemilihan kepala daerah sebelumnya belum pernah menghadirkan kolom kosong sebagai peserta pemilihan jika muncul calon tunggal dalam pemilihan. Penelitian ini akan berfokus pada analisis gerakan yang dilakukan AKDPP sebagai *civil society* dan sebagai gerakan sosial dalam Pilkada serentak di Kabupaten Pati 2017. Penelitian ini berusaha untuk menarik kesimpulan

bagaimana gerakan yang dilakukan AKDPP dalam menghadapi Pilkada di Kabupaten Pati 2017.

F. KERANGKA DASAR TEORI

1. *Civil Society*

Civil society diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam tiga cara, yaitu masyarakat sipil, masyarakat warga/ kewargaan, dan masyarakat madani. *Civil society* merupakan konsep yang lahir dari pandangan yang melihat adanya hubungan sedemikian rupa antara masyarakat dan negara. Pandangan tentang hubungan antara masyarakat dan negara mengalami evolusi dari masa ke masa. Terakhir berkembang pemikiran bahwa ada tiga pilar kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia, yaitu *state* (negara), *market* (pasar), dan *civil society* (Damsar, 2010).

Civil society, dikonsepsikan secara teoritis sebagai masyarakat yang bebas dari ketergantungan terhadap negara dan pasar, *self-reliance* (percaya diri), *self-supporting* (swasembada), *voluntary* (sukarela), dan taat akan nilai dan norma yang berlaku. Bebas dari ketergantungan negara dan pasar dimaksud sebagai suatu bentuk kebebasan dari masyarakat untuk melakukan aktivitas kemasyarakatan (sosial, budaya, politik, dan agama) tanpa adanya intervensi negara dan pasar (Damsar, 2010).

Dalam *civil society*, individu dan/atau kelompok individu memiliki *self-reliance* (percaya diri). Percaya diri merupakan suatu keadaan di mana potensi dan kapasitas yang dimiliki dipandang mampu menyelesaikan

persoalan-persoalan yang dihadapi. Sedangkan *self-supporting* (swasembada) adalah kemampuan melakukan sesuatu tanpa ada ketergantungan. Aktivitas-aktivitas kemasyarakatan yang dilakukan oleh *civil society* dilakukan tidak terpaksa, tetapi sebaliknya *voluntary* (sukarela). Terakhir, ketataan terhadap nilai dan norma yang berlaku merupakan ciri dari suatu komunitas yang telah menerapkan prinsip *civil society* (Damsar, 2010).

Sebagai sebuah ruang politik, *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas, tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat (Hikam, 1996).

Terjaminnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri dari masyarakat itu dalam kaitannya dengan kepentingan Negara. Artinya dengan kondisi yang demikian masyarakat mempunyai ruang gerak yang leluasa dalam mengekspresikan kepentingannya terhadap Negara. Bahkan kontrol terhadap negara-pun sangat kuat. Dengan begitu, kehidupan berbangsa dan bernegara akan semakin menunjukkan keseimbangan, antar Negara dan masyarakat tidak terjadi tirani (Hikam, 2000).

Keberadaan *civil society* tidak dapat dilepaskan demokrasi dan ruang publik. Usaha untuk merobohkan demokrasi hampir selalu berhubungan dengan usaha untuk meluluhlantahkan ruang lingkup masyarakat sipil (Damsar, 2010). Menurut Chandhoke (2001), tidak ada

demokrasi tanpa ruang publik, namun secara bersamaan, tidak akan ada demokrasi apabila ruang publik tersebut tidak luas dan representatif.

Tiga pilar kekuasaan yang bisa menggerakkan atau memengaruhi kehidupan kita. Yaitu, negara memiliki *political power* (kekuatan politik) melalui intervensi, pasar memiliki *economic power* (kekuatan ekonomi) melalui tangan-tangan tersembunyi, sedangkan *civil society* mempunyai *social power* (kekuatan sosial) melalui *social movement* (gerakan sosial) (Damsar, 2010).

1.1 Fungsi dan peran *civil society*

Mengenai fungsi dan peran *civil society* cukup beragam yang pada intinya memperkuat posisi masyarakat bila berhadapan dengan kepentingan Negara. Seperti dikemukakan sebelumnya dominasi negara yang terlanjur begitu kuat mengakar harus dibongkar terlebih dahulu guna melicinkan upaya demokratisasi selanjutnya, dalam konteks inilah *civil society* yang mengandaikan terbentuknya masyarakat kritis dan mandiri merupakan suatu keniscayaan (Hakim & Tanu, 2003).

Dengan mengembangkan *civil society*, kita bisa berharap kelak masyarakat tidak menggantungkan nasibnya pada Negara. Namun meski begitu, penghadapan rakyat dengan Negara secara diametral tetap merupakan keinginan yang melampaui batas. Selain memicu antagonisme, penghadapan ini pun akan menyulitkan pengorganisasian masyarakat yang pada titik tertentu dibutuhkan untuk menggalang kebersamaan dalam rangka menggerakkan roda

pembangunan. Maka makna *civil society* ini lebih dikonsentrasikan pada usaha pemberdayaan terhadap mereka yang kekurangan sumberdaya politik, ekonomi, social budaya dan lain sebagainya (Hakim & Tanu, 2003).

Bila semua sumberdaya tersebut sebelumnya relatif dikuasai oleh Negara agenda kerja yang harus dipikirkan sebagai sasaran tugas pokok *civil society* adalah memperkuat posisi masyarakat bila berhadapan dengan kepentingan Negara, dan bagaimana masyarakat bisa merasa siap dan mampu mengakses sumberdaya itu sambil menjaga independensinya dari intervensi Negara (Muzadi, 1999).

1.2 Ciri-ciri *civil society*

Dalam perspektif Hikam (2000), *civil society* adalah sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain : Kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), dan keswadayaan (*self supporting*). Kemandirian tinggi berhadapan dengan Negara, dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Dalam perwujudannya, ia akan berbentuk asosiasi atau organisasi yang dibuat oleh masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban-paguyuban atau kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*) yang merupakan perwujudan dari kelembagaan *civil society*.

2. Peluang Politik (*Political Opportunities*)

Dalam khasanah gerakan sosial yang berkembang di barat, banyak sekali pespektif yang berkembang dalam menganalisa kemunculan gerakan sosial. Sedangkan McAdam (1996) melihat tiga faktor utama dalam menganalisis kemunculan dan perkembangan gerakan sosial, yakni; mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*), peluang politik (*political opportunities*) dan proses pembingkaihan (*framing process*).

Pendekatan peluang politik (*political opportunities*). Pendekatan peluang politik ini tidak lagi sekadar terfokus secara sempit pada kehidupan internal organisasi gerakan, tetapi memberikan perhatian yang lebih sistematis pada lingkungan politik dan institusi. Gerakan sosial ditentukan oleh peluang dan ancaman di dalam sistem politik tertentu dan lingkungan yang lebih luas, atau apa yang kemudian lebih dikenal secara luas dengan konsep *political opportunity structure* (McAdam, Dough, John, & Mayer, 1996). Peluang politik menentukan kapan sebuah gerakan social memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan kemajuan-kemajuan signifikan.

McAdam (1996) melihat beberapa dimensi penting dari struktur peluang politik yaitu: (1) tingkat keterbukaan dan ketertutupan di dalam sistem politik terinstitusionalisasi (*institutionalized political system*); (2) stabilitas dan instabilitas perangkat atau susunan elit (*elite alignments*) yang luas, yang secara tipikal menyiapkan (*undergird*) sebuah pemerintahan; (3) ada dan tidak adanya pengelompokan-pengelompokan elit; (4) kapasitas negara dan kecenderungan untuk menindas. Secara

sederhana, perspektif ini memandang lingkungan eksternal sangat mempengaruhi gerakan sosial. Di negara yang menganut sistem demokrasi atau konfigurasi politik demokratis, terbuka kesempatan bagi rakyat untuk melakukan berbagai bentuk partisipasi politik. Peluang-peluang politik juga tidak hanya menguntungkan bagi gerakan sosial. Namun, ia bisa juga dipergunakan oleh para lawannya untuk melemahkan gerakan. Dengan kata lain, peluang tersebut bukanlah monopoli gerakan, tetapi bisa juga dimanfaatkan kekuatan-kekuatan kontra-gerakan, yang kepentingan di antara mereka berbeda secara diametral.

3. Gerakan Sosial

Terdapat beberapa pendekatan untuk memahami teori-teori gerakan sosial. Beberapa pendekatan teoritis yang berbeda dalam gerakan sosial dapat didefinisikan sesuai dengan penekanan pada salah satu diantara empat faktor ini: ketidakpuasan, sumber daya, peluang politik, atau proses-proses kontruksi pemaknaan. Selain itu gerakan sosial telah dikonseptualisasikan sebagai epifenomena dari *societal breakdown* (perpecahan masyarakat), sebagai kegiatan politik dengan cara lain, atau sebagai kolektivitas di dalam pencarian identitas (baru). Penekanan pada faktor ketidakpuasan bersesuaian dengan teori perpecahan (*breakdown theories*); sumber daya dan peluang cocok dengan pandangan tentang gerakan sebagai tindakan politik dengan cara lain, dan kontruksi makna dan pembentukan identitas adalah konsep yang serumpun (Hasanudin, 2011).

Secara umum gerakan sosial memiliki berbagai definisi karena beragamnya ruang lingkup yang dimilikinya. Gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau gerakan untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan (Giddens, 2006). Definisi senada dirumuskan oleh seorang teoritis terkemuka Sydney Tarrow (1998, p. 4), gerakan sosial adalah tantangan-tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama dan solidaritas sosial, dengan interaksi yang berkelanjutan dengan para elit, penentang dan pemegang wewenang. Definisi ini kemudian menurut mereka meliputi dua ciri gerakan sosial, yaitu:

- a. Gerakan sosial melibatkan beberapa tujuan yang bersifat kolektif yang merupakan upaya-upaya yang terorganisasi untuk mewujudkan perubahan dalam unsur-unsur kelembagaan (misalnya: kelembagaan politik atau pemerintah). Tujuan ini dapat berpusat pada kebijakan-kebijakan publik atau ditujukan sekedar untuk mengawasi proses perubahan sosial dalam unsur-unsur kelembagaan sosial politik.
- b. Gerakan yang bersifat atau mengarah pada tujuan politis yang dibawa gerakan sosial ini. Tujuan-tujuan ini hanya mungkin dicapai apabila gerakan sosial melibatkan diri dalam interaksi dengan berbagai aktor-aktor politik, misalnya dengan pemegang kekuasaan.

Gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit,

pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya. Ketika perlawanan ini didukung oleh jaringan sosial yang kuat, dan digaungkan oleh resonansi kultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan, dan hasilnya adalah gerakan sosial (Tarrow, 2006).

Tidak semua bentuk perlawanan politik yang bertebaran di berbagai belahan dunia bisa disebut sebagai gerakan sosial. Konsep gerakan sosial harus memiliki empat properti dasar (Tarrow S. , 1998), yaitu:

a. Tantangan kolektif (*collective challenge*)

Yang membedakan gerakan sosial dari tindakan-tindakan kolektif lain, seperti memberikan suara (voting), permainan sepak bola, dan lain-lain adalah bahwa gerakan sosial selalu ditandai oleh tantangan-tantangan untuk melawan melalui aksi langsung yang mengganggu terhadap para elit, pemegang otoritas, kelompok-kelompok lain, atau aturan-aturan kultural tertentu.

Tantangan kolektif seringkali ditandai oleh tindakan mengganggu, menghalangi, atau membuat ketidakpastian terhadap aktivitas-aktivitas pihak lain. Dalam sistem represif, tantangan kolektif disimbolisasikan lewat slogan, corak pakaian dan musik, atau penamaan baru objek-objek familiar dengan simbol yang berbeda atau baru. Bahkan di negara-negara demokrasi liberal, orang-orang yang mengidentifikasi diri dengan suatu gerakan mempertontonkannya

melalui kata-kata, corak pakaian, dan perilaku pribadi yang mencirikan tujuan kolektif mereka.

Tantangan kolektif merupakan karakteristik paling umum dari gerakan sosial. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa gerakan sosial biasanya kurang memiliki sumberdaya yang stabil (dana, organisasi, akses terhadap negara). Dalam menghampiri konstituen baru dan menegaskan klaim-klaim mereka, penentangan (*contention*) mungkin hanya satu-satunya sumberdaya gerakan yang bisa dikuasai. Karena itu, gerakan mempergunakan tantangan kolektif untuk menjadi *focal point* (titik fokus) bagi para pendukung, memperoleh perhatian dari kubu yang dilawan dan pihak ketiga, dan menciptakan konstituen untuk diwakili.

b. Tujuan bersama (*common purpose*)

Ada banyak alasan bisa dikemukakan tentang mengapa orang bergabung dalam suatu gerakan sosial, dari sekedar keinginan nakal, mencemooh otoritas hingga insting gerombolan yang tidak jelas tujuannya. Namun, jika ada alasan yang paling jelas mengapa orang terikat bersama dalam gerakan adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihak lawan, pemegang otoritas, atau para elit. Tidak semua konflik semacam itu muncul dari kepentingan kelas, tetapi nilai dari kepentingan bersama dan tumpang tindih merupakan basis dari tindakan-tindakan bersama.

c. Solidaritas dan identitas

Sesuatu yang menggerakkan secara bersama-sama (*common denominator*) dari gerakan sosial adalah pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersama yang kemudian mengantarai perubahan dari sekedar potensi gerakan menjadi aksi nyata. Dengan cara menggerakkan konsesus, perancang gerakan memainkan peran penting dalam merangsang munculnya konsesus semacam itu. Namun, para pemimpin hanya dapat menciptakan suatu gerakan sosial ketika mereka menggali lebih dalam perasaan-perasaan solidaritas atau identitas, yang biasanya bersumber dari nasionalisme, etnisitas, atau keyakinan agama.

d. Memelihara politik perlawanan

Hanya dengan cara memelihara aksi kolektif melawan pihak musuh, suatu episode perlawanan bisa menjadi gerakan sosial. Tujuan kolektif, identitas bersama, dan tantangan yang dapat diidentifikasi membantu gerakan untuk memelihara politik perlawanan ini. Sebaliknya, jika mereka tidak mampu memelihara tantangan bersama, maka gerakan mereka akan menguap menjadi semacam kebencian atau kemarahan individu, atau berubah menjadi sekte religious, atau mungkin menarik diri ke dalam isolasi. Karena itu, memelihara aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat menandai titik pergeseran dimana suatu penentangan (*contention*) berubah menjadi suatu gerakan sosial.

Gerakan sosial tidak dapat direpresentasikan oleh suatu organisasi tertentu. Oleh karenanya pelaku gerakan sosial tidak tunggal. Gerakan sosial direpresentasikan oleh cita-cita yang akan diusung, oleh karena itu gerakan sosial memiliki ciri inklusif, tidak didominasi dan direpresentasikan oleh satu atau dua organisasi. Karena ciri yang inklusif dimana setiap pihak yang setuju dengan cita-cita gerakan dapat terlibat dalam gerakan, maka sebuah gerakan sosial sesungguhnya merupakan pertukaran berbagai pihak yang bersedia bekerja untuk perubahan. Sebagai sebuah proses, gerakan sosial melibatkan pertukaran sumber daya yang berkesinambungan bagi pencapaian tujuan bersama di antara beragam aktor individu maupun kelembagaan mandiri. Strategi, koordinasi dan pengaturan peran dalam aksi kolektif ditentukan dari negosiasi yang terus menerus diantara aktor-aktor yang terlibat diikat oleh identitas kolektif (Canel, 1997).

Pengertian yang hampir sama memaknai gerakan sosial sebagai satu bentuk perilaku kolektif tertentu dimana motif untuk aksi berasal sebagian besar dari sikap-sikap dan aspirasi-aspirasi dari para anggota, secara khas bereaksi didalam sebuah kerangka organisasional yang longgar (Heywood, 2013). Beberapa aspek dalam gerakan sosial adalah adanya ide-ide yang luas, pembentukan aksi publik, pengorganisasian sarana, serta penggunaan simbol ataupun slogan (Markoff, 1996).

Gerakan sosial lahir pada mulanya sebagai suatu kelompok orang yang tidak puas terhadap suatu kondisi atau keadaan. Kelompok itu semula

tidak terorganisasi, dan tidak terarah, serta tidak memiliki perencanaan yang matang. Orang-orang saling membagi duka dan mengeluh. Pemimpin dan organisasi dalam kebanyakan gerakan biasanya muncul tidak lama setelah situasi keresahan sosial tercipta. Setelah mengalami tahap penurunan kegiatan, kadang kala gerakan-gerakan itu hilang begitu saja tanpa bekas yang berarti (Horton, 1999).

Gerakan sosial baru umumnya melibatkan politik akar rumput, kerap memprakarsai gerakan-mikro kelompok-kelompok kecil, membidik isu-isu lokal dengan sebuah dasar institusi yang dibatasi (Singh, 2010). Perbedaan antara gerakan-gerakan sosial tradisional dan gerakan-gerakan sosial baru adalah bahwa gerakan-gerakan sosial baru cenderung memiliki struktur-struktur organisasional yang menekankan desentralisasi dan pembuatan keputusan partisipatori dan juga telah mengembangkan bentuk-bentuk aktivisme politik baru. Gerakan sosial baru umumnya mempraktikkan apa yang terkadang disebut 'politik baru' yang menjauh dari partai-partai, kelompok-kelompok kepentingan dan proses-proses keterwakilan yang telah mapan ke arah satu bentuk politik protes yang lebih inovatif dan teatral (Heywood, 2013).

3.1 Tipologi dan strategi gerakan sosial

Menurut Sztompka ada beberapa klasifikasi gerakan sosial yang didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: *pertama*, menurut bidang perubahanyang diinginkan, *kedua*, menurut kualitas perubahan yang diinginkan. *Ketiga*, menurut target perubahannya. *Keempat*, menurut arah

perubahan yang diinginkan. *Kelima*, menurut strategi yang mendasari atau “logika tindakan mereka”. *Keenam*, menurut sejarah perkembangannya.

a. Menurut bidang perubahan yang diinginkan. Tipe gerakan sosial ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Gerakan reformasi, yang merupakan gerakan sosial dengan tujuan terbatas hanya untuk mengubah spek tertentu dalam masyarakat tanpa menyentuh intistruktur lembaganya. Misal: gerakan menolak UU antipornografi dan pornoaksi.
2. Gerakan radikal, merupakan gerakan yang mengupayakan perubahan yang lebih mendalam yang menyentuh landsan organisasi sosial. Misal: gerakan antiapartheid di Afrika Selatan.

b. Menurut kualitas perubahan yang diinginkan. Kelompok gerakan ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Gerakan *konservatif*. Gerakan ini merupakan gerakan yang mengarah ke masa lalu. Gerakan ini berupaya memperbaiki lembaga, hukum, cara hidup serta keyakinan yang telah mapan dimasa lalu tetapi mengalami erosi dan dibuang dalam perjalanan sejarah.
2. Gerakan *progresif*, yaitu gerakan yang menekankan pada inovasi, mengenalkan lembaga baru yang berorientasi masa depan.

c. Menurut target perubahannya. Tipe gerakan sosialini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Gerakan sosial yang memusatkan target perubahannya pada perubahan struktur sosial. Misal: gerakan reformasi di Indonesia pada tahun 1966 dan 1998. Beberapa kelompok gerakan ini biasanya akan bergabung (berafiliasi) dengan partai politik. Tetapi ada juga yang tetap berada di luar sistem partai politik.
 2. Gerakan sosial yang berorientasi pada perubahan diri individu. Misal: gerakan keagamaan yang menginginkan perubahan dalam diri individu, gerakan disiplin nasional.
- d. Menurut arah perubahan yang diinginkan. Tipe gerakan sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Gerakan sosial positif, yaitu berupaya untuk mengenalkan perubahan tertentu serta membuat perbedaan. Gerakan ini juga dimaksudkan untuk memerangi suatu kebijakan yang dinilai memberi dampak negatif.
 2. Gerakan sosial negatif. Gerakan sosial ini dimobilisasi untuk mengganti undang-undang tertentu. Misal: gerakan menolak UU antipornografi dan pornoaksi.
- e. Menurut strategi yang mendasari atau "logika tindakan mereka". Ada dua tipe gerakan ini, yaitu:
1. Gerakan yang mengikuti logika instrumental yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik dan dengan kekuatan politik itu mereka memaksakan perubahan yang diinginkan dalam peraturan hukum, lembaga dan organisasi masyarakat. Tujuannya adalah sebagai alat kontrol politik.

2. Gerakan yang mengedepankan logika perasan. Gerakan ini bertujuan untuk menguatkan identitas agar mendapat pengakuan umum dan mendapat posisi yang setara dengan kelompok lain. Gerakan ini misalnya adalah gerakan perempuan (feminisme).
- f. Menurut sejarah perkembangannya. Tipologi gerakan sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Gerakan sosial lama (GSL) yaitu gerakan sosial yang menonjol pada masa awal modernisasi. Gerakan sosial ini memusatkan perhatian pada kepentingan ekonomi, anggotanya kebanyakan direkrut dari kelas sosial tertentu, sifat organisasinya kaku serta desentralistis.
 2. Gerakan sosial baru (GSB) yaitu gerakan sosial yang muncul pada masa akhir perkembangan modernisasi. Gerakan ini memiliki ciri yaitu memusatkan perhatian pada isu-isu baru, kepentingan baru, serta medan konflik kepentingan baru. Misal: gerakan feminis, gerakan hak-hak sipil, gerakan lingkungan dll.

Selain tipologi gerakan sosial tersebut, seiring perkembangan teknologi, dapat ditambahkan tipologi gerakan sosial menurut *masa berlaku* dan *wujud keanggotaannya* (Martono, 2016).

- g. Tipologi gerakan sosial menurut masa berlakunya dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Gerakan sosial yang bersifat temporal atau sementara. Gerakan sosial ini muncul secara spontan dan kemudian hilang dengan

sendirinya ketika momen atau peristiwa yang melatarbelakangi berdirinya gerakan tersebut telah berakhir.

2. Gerakan sosial bersifat permanen. Masa berlaku gerakan sosial ini cukup lama, misalnya gerakan disiplin nasional, gerakan hidup bersih dll.
- h. Gerakan sosial menurut wujud keanggotaannya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:
1. Gerakan sosial abstrak, yaitu gerakan sosial yang anggota atau pengikutnya tidak berbentuk secara fisik, namun tetap memiliki anggota. Tipe gerakan sosial ini memanfaatkan dunia maya dan anggotanya juga seringkali tidak jelas domisilinya.
 2. Gerakan sosial konkret, yaitu gerakan sosial yang para anggotanya dapat ditemukan secara fisik. domisili anggotanya dapat diketahui.

Gerakan sosial dalam mencapai tujuan yang diinginkan memiliki berbagai strategi. Menurut Suharko (Martono, 2016) strategi yang dapat digunakan gerakan sosial biasanya didasarkan pada penilaian terhadap konteks atau latar politik tertentu, pertimbangan pihak lawan yang dihadapi, isu yang dibidik, dan kekuatan, serta sumber daya yang dimiliki organisasi gerakan sosial. Ada empat strategi yang dapat digunakan gerakan sosial, yaitu:

- a. *Low profile strategy.*

Menurut Fisher (Martono, 2016), strategi ini dinamakan “isolasi politik” yang secara khusus sesuai dengan konteks politik yang efektif dan represif untuk menghindari kooptasi dari pemegang kekuasaan

yang otoritarian. Aktor gerakan dalam hal ini secara sadar memutuskan untuk mengisolasi diri atau menghindari hubungan dengan agen-agen negara. Ruang untuk mengisolasi diri biasanya ditemukan di tingkat lokal tempat aktor berbasis komunitas aktif dalam rangka mengembangkan atau mengorganisasi kelompok-kelompok sosial berdasarkan sumberdaya lokal.

b. Strategi pelapisan (*layering*).

Strategi ini dikemukakan oleh Fowler. Strategi ini mirip dengan strategi pertama. Menurut Fowler (Martono, 2016), strategi ini sangat sesuai untuk organisasi gerakan sosial yang beroperasi di negara-negara yang membatasi aktivitas otonom di luar pemerintah. Pelapisan merupakan pengembangan penyediaan pelayanan yang berorientasi kesejahteraan yang sebenarnya berisi metode dan aktifitas yang berorientasi pemberdayaan dan transformasi sosial. Dengan melakukan strategi ini, organisasi gerakan sosial dapat menghindari diri dari aksi dan intervensi langsung dari pihak lawan.

c. Strategi Advokasi.

Strategi ini sering disebut juga dengan strategi pendampingan, yang merupakan strategi utama yang sering digunakan kalangan LSM. Strategi advokasi seringkali digunakan untuk mendesakkan perubahan-perubahan sosial, seperti mereformasi tata pemerintahan yang demokratis, melindungi sumberdaya alam atau lingkungan, memajukan pembangunan berkelanjutan, dll.

d. Strategi keterlibatan kritis.

Strategi ini merupakan strategi yang mengombinasikan strategi advikasi dengan strategi kerjasama ketika menghadapi pemerintah atau agen-agen resmi negara (misalnya: parlemen, badan yudikatif, dan militer). Meskipun kerja sama antara LSM dengan pemerintah lebih lazim dalam aktifitas penyediaan pelayanan umum, namun dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik, LSM dapat mengkombinasikan strategi kerjasama dengan advokasi.

4. *Civil society* sebagai Gerakan Sosial

Keberadaan *civil society* tidak dapat dilepaskan demokrasi dan ruang publik. Usaha untuk merobohkan demokrasi hampir selalu berhubungan dengan usaha untuk meluluhlantahkan ruang lingkup masyarakat sipil (Damsar, 2010). Menurut Chandhoke (2001), tidak ada demokrasi tanpa ruang publik, namun secara bersamaan, tidak akan ada demokrasi apabila ruang publik tersebut tidak luas dan representatif.

Tiga pilar kekuasaan yang bisa menggerakkan atau memengaruhi kehidupan kita. Yaitu, negara memiliki *political power* (kekuatan politik) melalui intervensi, pasar memiliki *economic power* (kekuatan ekonomi) melalui tangan-tangan tersembunyi, sedangkan *civil society* mempunyai *social power* (kekuatan sosial) melalui *social movement* (gerakan sosial) (Damsar, 2010).

Aktivisme *civil society* di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia secara mendasar telah menempatkan bekerjanya sistem serta struktur politik dan pemerintahan yang demokratis sebagai tujuan utama yang harus diwujudkan. Salah satu bentuk aktivisme *civil society* adalah

gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan salah satu bentuk aktivisme *civil society* yang khas, yang memiliki definisi sebagai bentuk aksi kolektif dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama (Triwibowo, 2006). Ikatan-ikatan dan jejaring sosial yang luas tersebut pada gilirannya akan membantu proses mobilisasi sumber daya, tidak hanya di tingkat sektor namun juga di tingkat makro pada organisasi gerakan sosial.

Melalui gerakan-gerakan sosial, para partisipan pada dasarnya berpartisipasi dalam kehidupan politik. Namun partisipasi mereka itu bersifat tidak kontinu dan kurang terorganisir. Jika para partisipan suatu gerakan sosial ingin meneruskan perjuangan mereka secara lebih sistematis dan teratur dalam jangka panjang, mereka harus membentuk partai politik atau sekurang-kurangnya mereka bekerjasama atau mendukung suatu partai politik yang ada (Hikam, 1996).

Gerakan sosial tidak dapat direpresentasikan oleh suatu organisasi tertentu. Oleh karenanya pelaku gerakan sosial tidak tunggal. Gerakan sosial direpresentasikan oleh cita-cita yang akan diusung, oleh karena itu gerakan sosial memiliki ciri inklusif, tidak didominasi dan direpresentasikan oleh satu atau dua organisasi. Karena ciri yang inklusif dimana setiap pihak yang setuju dengan cita-cita gerakan dapat terlibat dalam gerakan, maka sebuah gerakan sosial sesungguhnya merupakan

pertukaran berbagai pihak yang bersedia bekerja untuk perubahan. Sebagai sebuah proses, gerakan sosial melibatkan pertukaran sumber daya yang berkesinambungan bagi pencapaian tujuan bersama di antara beragam aktor individu maupun kelembagaan mandiri. Strategi, koordinasi dan pengaturan peran dalam aksi kolektif ditentukan dari negosiasi yang terus menerus diantara aktor-aktor yang terlibat diikat oleh identitas kolektif (Canel, 1997).

Gerakan sosial adalah "ruang antara" yang menjembatani masyarakat sipil dan negara (Canel, 1997) . Gerakan sosial adalah ruang antara pasifisme publik dengan pembusukan negara (abuse of power) . Dengan sendirinya gerakan sosial mengambil tanggung jawab publik atas peran-peran yang seharusnya dijalankan oleh negara seperti jaminan keamanan, jaminan kesejahteraan, partisipasi yang lebih luas dan lain sebagainya. Melalui ruang tersebut gerakan sosial mampu mempolitisasi *civil society* tanpa harus mereproduksi kontrol, regulasi, dan intervensi seperti yang dilakukan oleh negara.

G. DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi konseptual merupakan definisi dari konsep-konsep yang dipakai dan menjadi pokok perhatian pada penelitian, yang dimaksudkan sebagai gambaran, guna menghindari kesalah pahaman terhadap pengertian konsep-konsep yang digunakan dalam sebuah penelitian dan untuk mengetahui batasan tentang istilah yang ada dalam pokok bahasan. Adapun batas bahasan pengertian konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. *Civil Society*

Civil society diterjemahkan sebagai masyarakat sipil, masyarakat warga/ kewargaan, dan masyarakat madani. *Civil society*, dikonsepsikan secara teoritis sebagai masyarakat yang bebas dari ketergantungan terhadap negara dan pasar, *self-reliance* (percaya diri), *self-supporting* (swasembada), *voluntary* (sukarela), dan taat akan nilai dan norma yang berlaku.

2. Peluang Politik (*political Opportunities*)

Pendekatan peluang politik (*political opportunities*). Pendekatan peluang politik ini tidak lagi sekadar terfokus secara sempit pada kehidupan internal organisasi gerakan, tetapi memberikan perhatian yang lebih sistematis pada lingkungan politik dan institusi. Gerakan sosial ditentukan oleh peluang dan ancaman di dalam sistem politik tertentu dan lingkungan yang lebih luas, atau apa yang kemudian lebih dikenal secara luas dengan konsep *political opportunity structure*

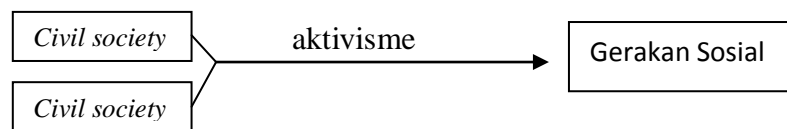
3. Gerakan sosial

Gerakan sosial adalah gerakan kolektif oleh sekelompok orang yang terorganisir yang terbentuk dari sikap-sikap, aspirasi-aspirasi anggotanya dengan ide-ide yang luas, terorganisasi, dan slogan inovatif untuk memprotes institusi yang telah mapan seperti partai politik dan memiliki tujuan untuk menghambat atau mendorong suatu perubahan dalam masyarakat.

4. *Civil Society* sebagai Gerakan Sosial

Gerakan sosial merupakan salah satu bentuk aktivisme *civil society* yang khas, yang memiliki definisi sebagai bentuk aksi kolektif dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama.

Skema *civil society* menjadi gerakan sosial:



H. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan suatu usaha untuk menjelaskan sesuatu konsep yang masih berbentuk konstruk menjadi kata-kata yang bisa menggambarkan bentuk dan perilaku dari fokus penelitian yang dapat diuji kebenarannya oleh orang lain. Definisi operasional ini dimaksudkan untuk memperjelas konsep-konsep dari pergerakan yang dilakukan oleh relawan kotak kosong pati dalam upaya memenangkan kontestasi politik di pemilihan kepala daerah Kabupaten Pati tahun 2017 melawan pasangan calon petahana Haryanto dan Syaiful Arifin, antara lain:

1. Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati sebagai Gerakan Sosial
 - a. Tantangan kolektif
 - b. Tujuan bersama
 - c. Solidaritas dan identitas kolektif
 - d. Memelihara politik perlawanan
2. Tipologi gerakan sosial Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati:

- a. Bidang perubahan
 - b. Kualitas perubahan
 - c. Target perubahan
 - d. Arah perubahan
 - e. Logika yang mendasari
 - f. Sejarah perkembangan
 - g. Masa berlaku
 - h. Wujud anggota
3. Strategi yang digunakan gerakan oleh Aliansi Kawal Demokrasi PilkadaPati:
- a. *Low profile strategy*
 - b. Strategi pelapisan (*layering*).
 - c. Strategi advokasi
 - d. Strategi keterlibatan kritis

I. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pertimbangan pemilihan metode kualitatif sebagai alat pegangan bagi penelitian ini dalam melihat realitas adalah untuk dapat menggali secara mendalam sebuah fenomena yang ada. Selain itu pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada rumusan-rumusan yang muncul dalam penelitian ini yang menuntut penulis untuk melakukan berbagai aktivitas eksplorasi dalam rangka memahami dan menjelaskan masalah-masalah yang menjadi fokus masalah penelitian ini. Kemudian

pengumpulan berbagai data dan informasi akan dilakukan melalui wawancara, dan dokumen mengenai sumber-sumber data yang diperlukan.

Denzin dan Lincoln (Moleong, 2007), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Pengertian lain, penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (Satori & Aan, 2012).

Penelitian kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif biasanya dilakukan peneliti untuk menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai keadaan objek atau subjek amatan secara rinci (Suryanto, 2011). Metode deskriptif dapat diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, situasi kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Natzir, 1998). Penelitian deskriptif bertujuan membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Suryabrata, 2003).

Jadi penelitian kualitatif-deskriptif adalah metode penelitian yang menafsirkan fenomena yang terjadi, mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar untuk menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai keadaan objek atau subjek amatan

secara rinci dan membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pati khususnya di Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDP) . lokasi ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui pergerakan yang dilakukan oleh relawan kotak kosong pati dalam upaya memenangkan kontestasi politik di pemilihan kepala daerah Kabupaten Pati tahun 2017 melawan pasangan calon petahana Haryanto dan Syaiful Arifin.

3. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan objek penelitian (Koentjaraningrat, 1993). Dalam penelitian ini data primer bersumber dari hasil wawancara dengan informan.

Untuk mendapatkan dari primer, penulis mengklasifikasikan aktor-aktor yang potensial untuk dijadikan sebagai narasumber atau informan. Aktor yang potensial untuk dijadikan sebagai narasumber atau informan dalam penelitian adalah aktor-aktor yang terlibat langsung dalam Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) dan merupakan penggerak atau anggota dari AKDPP.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian di dalam unit analisa yang dijadikan objek penelitian (Koentjaraningrat, 1993). Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, dokumen hasil penelitian, informasi dari media massa dan sebagainya.

Buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku mengenai gerakan sosial untuk memperkuat data primer. selain itu data sekunder lainnya adalah informasi dari media massa, di dalam media massa penulis akan mendapatkan informasi mengenai gerakan yang dilakukan oleh relawan kotak kosong yang tergabung dalam Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab (Satori & Aan, 2012).

Dalam penelitian ini, penulis mengklasifikasikan aktor-aktor yang potensial untuk dijadikan sebagai narasumber atau informan. Aktor yang potensial untuk dijadikan sebagai narasumber atau informan dalam penelitian adalah aktor-aktor yang terlibat langsung dalam relawan kotak

kosong yang tergabung dalam Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati dan merupakan penggerak atau anggota relawan kotak kosong yang tergabung dalam AKDPP.

Ada pun identitas informan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2
Identitas informan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Peran
1	Sutiyo	Laki-laki	Ketua AKDPP
2	A Itqonul Hakim	Laki-laki	Sekretaris AKDPP
3	Kardono	Laki-laki	Relawan
4	Imam Rosyidi	Laki-laki	Relawan

b. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk. Dengan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tapi memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan, budaya, karya seni dan karya pikir (Satori & Aan, 2012).

Dalam teknik ini, peneliti berusaha mengumpulkan sumber-sumber data yang berasal dari berbagai sumber, diantaranya adalah buku-buku, arsip-arsip, agenda, catatan-catatan maupun melalui media online lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi

yang peneliti maksud adalah data-data dokumentasi terkait dengan gerakan kotak kosong atau AKDPP.

Ada pun beberapa sumber data, diantaranya sebagai berikut:

- i. www.relawankotakpati.org
- j. www.tirto.id
- k. www.suaramerdeka.com
- l. www.murianews.com

5. Teknik analisa data

Analisis data merupakan proses penafsiran hasil penelitian, penafsirannya meliputi perbandingan antara apa yang diprediksi di awal penelitian dan hasil yang diperoleh sesudah penelitian. Dalam proses penafsiran data biasanya berlangsung dalam tiga tahap. Pertama, peneliti menafsirkan teks yang disampaikan oleh partisipan. Kedua, peneliti menyusun kembali hasil penelitian tingkat pertama dan mendapatkan tema-temanya. Ketiga, menghubungkan tema-tema tersebut sehingga membentuk teori, gagasan dan pemikiran baru (Raco, 2010).

Berdasarkan uraian di atas maka teknik analisis data pada penelitian ini melewati tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dihasilkan dari proses studi pustaka, interview (wawancara) dan observasi.

b. Penilaian Data

Data yang telah didapatkan kemudian dikaji dan dinilai untuk mendalami dan mengetahui keabsahan dan kesesuaian dari data primer dan data skunder.

c. Interpretasi Data

Data yang sudah dikaji dan dinilai kemudian diinterpretasikan lewat reduksi pada penelitian ini yang disesuaikan dengan teori-teori yang dijadikan landasan penelitian.

d. Generalisasi

Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dengan cara menghubungkan hasil penelitian yang dihasilkan dari proses penelitian, bertolak dari fenomena yang terjadi dilapangan menuju kesimpulan umum. Dengan harapan dapat menambah wawasan secara teoritis yang sesuai dengan tujuan penelitian.